

## **PENOLAKAN SPANYOL TERHADAP DEKLARASI KEMERDEKAAN DAERAH OTONOMI CATALONIA TAHUN 2017**

**Annisa Rizki Yuniar**

20140510218

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183.

Email: annisa.rizki.2014@fisipol.umy.ac.id / annisaapp@gmail.com

### **Abstrak**

*Spanyol adalah salah satu negara di Eropa yang memiliki 19 daerah otonomi di dalamnya. Salah satu daerah otonomi yang ada di Spanyol ialah Catalonia, yang juga merupakan wilayah dengan potensi yang sangat menunjang bagi pertumbuhan ekonomi Spanyol. Catalonia menjadi wilayah integral Spanyol pada tahun 1714, dan hal tersebut menimbulkan nasionalisme yang tinggi terhadap daerah Catalonia. Dengan keunikan dan warisan sejarah yang dimilikinya, Catalonia diberikan hak otonomi untuk mengatur daerah nya sendiri termasuk dengan membentuk Pemerintahan Catalonia yang bernama Generalitat. Namun, pada masa pemerintahan Jenderal Francisco Franco, terjadi penyeragaman satu Spanyol dengan menghapuskan hak otonomi dan melarang penggunaan bahasa daerah termasuk Catalonia serta atribut lain yang memicu nasionalisme berlebihan terhadap suatu daerah. Kediktatoran Francisco Franco dapat meredam nasionalisme dipermukaan, namun jauh didalam nasionalisme tersebut semakin berkembang. Hak otonomi Catalonia didapatkan lagi setelah Jenderal Francisco Franco meninggal dan Pemerintahan Catalonia atau Generalitat dibentuk kembali. Catalonia mengajukan perubahan status otonominya pada tahun 2006, yang kemudian diubah oleh Pemerintah Spanyol pada tahun 2010. Sejak saat itu semangat separatisme semakin kuat, puncaknya terjadi pada referendum kemerdekaan tahun 2017 yang disusul dengan deklarasi kemerdekaan Catalonia secara sepihak dan menuai respon berupa penolakan oleh Spanyol.*

**Keywords:** *Separatisme, Catalonia, Spanyol, Referendum, Deklarasi Kemerdekaan.*

## **PENOLAKAN SPANYOL TERHADAP DEKLARASI KEMERDEKAAN DAERAH OTONOMI CATALONIA TAHUN 2017**

### **Pendahuluan**

Spanyol adalah salah satu negara di Eropa dengan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional yang berarti negaranya dipimpin oleh Raja atau Ratu dan diatur dibawah aturan tertulis atau Undang – Undang. Spanyol membagi kekuasaan nya menjadi 3 bagian lembaga yaitu Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Mengenai Pemerintahan Daerah, Spanyol dahulu tidak mengakui keanekaragaman daerah yang

ada di negaranya karena Spanyol menganut sistem pemerintahan terpusat pada negara. Desentralisasi pemerintahan sempat diberlakukan, namun menimbulkan kekacauan yang akhirnya Spanyol mengembalikan pemerintahannya ke Monarki Konstitusional. Konstitusi Spanyol memberikan kesempatan bagi daerah di negaranya untuk menjadi Daerah Otonomi, hal tersebut dikelompokkan menjadi 2 dalam Konstitusi Spanyol yang masing masing memiliki jalur pengakuan yang berbeda serta tingkatan kekuasaan dan tanggung jawab yang berbeda. Pada 1983 Spanyol memiliki 17 Daerah Otonomi yang didalamnya terdapat 3 Daerah Otonomi yang mendapat pengakuan nya sebagai Daerah Otonomi dengan cepat dan tingkatan tanggung jawab serta kuasa yang tinggi yaitu Catalonia, Basque dan Galicia. (Richard John Harrison, 2017)

Catalonia merupakan salah satu wilayah yang berada di Spanyol dan beribukota di Barcelona. Wilayah Catalonia adalah wilayah yang sangat potensial dan menyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi Spanyol. Bahkan Catalonia merupakan wilayah yang paling kaya dan menjadi alat pemasukan utama bagi Spanyol. Atas kekayaan dan potensi wilayah yang dimiliki oleh Catalonia, Catalonia merasa mereka mempunyai hak untuk menentukan nasib nya sendiri. Terlebih, Catalonia memiliki sistem pemerintahan sendiri yang disebut *Generalitat de Catalunya*, memiliki bendera sendiri, memiliki bahasa, adat dan kebudayaan sendiri yang jelas berbeda dengan Spanyol. Wilayah bekas kerajaan di Spanyol cenderung memiliki nasionalisme yang tinggi akan wilayahnya sendiri, sama seperti Catalonia. Catalonia sendiri adalah bekas kerajaan Aragon yang menjadi wilayah integral Spanyol pada tahun 1714. Penduduk di Catalonia merasa bahwa diri mereka bukanlah bagian dari Spanyol, bahwa mereka bukanlah warga negara Spanyol, mereka justru merasa bahwa Catalonia seharusnya mampu berdiri sendiri dan memisahkan diri dengan Spanyol. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gerakan separatisme atau memisahkan diri, dan keinginan untuk merdeka dan berdiri sendiri bagi Catalonia dari Spanyol.

## **SISTEM PEMERINTAHAN SPANYOL DAN DAERAH OTONOMI KHUSUS DI SPANYOL**

### **1. Sistem Pemerintahan Spanyol**

Spanyol merupakan negara dengan bentuk Monarki Konstitusional atau Kerajaan dengan Undang – Undang yang telah disepakati dan digunakan tidak hanya sebagai aturan bagi rakyat namun juga menjadi pengatur dan pembatas dari tindakan – tindakan Raja. Spanyol juga telah mengalami pergantian atau transisi sistem pemerintahan beberapa kali. Transisi yang terjadi beberapa kali tersebut membuahkan hasil yang menjadikan Spanyol sebagai Negara Demokrasi, dan hal tersebut membuat Spanyol sebagai panutan bagi negara – negara yang ingin merubah negaranya menjadi sebuah Negara Demokrasi.

Sebelum pergantian sistem pemerintahan tersebut, Spanyol tetaplh Monarki atau kekuasaan yang berpusat dan diatur oleh Raja serta memiliki konstitusi tertulis. Kecuali pada masa transisi yaitu *First Republic* (1873 - 1874), *Second Republic* (1931 – 1936), dan Perang Sipil (1936 – 1939), serta pada Masa Pemerintahan Jenderal Francisco Franco (1939 – 1975). Transisi Sistem Pemerintahan Spanyol menjadi sistem

yang demokrasi tersebut dipengaruhi kuat atas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya yaitu *Second Republic*, Perang Sipil dan perubahan – perubahan yang secara signifikan terjadi saat masa Pemerintahan Jenderal Franco yang merupakan diktator dalam era pemerintahannya dan demokrasi benar – benar diwujudkan setelah masa pemerintahan Jenderal Francisco Franco yang diktator berakhir.

#### **A. *First Republic* (1873 – 1874)**

Dimasa pertama kalinya Spanyol menjadi Republik, terjadi bukan karena adanya gelombang pendapat yang besar yang menginginkan perubahan dari Monarki atau Kerajaan menjadi Republik atau karena merupakan tugas dari partai – partai yang dibentuk secara baik untuk suatu saat mereformasi sistem, pemerintahan negaranya. Bukan, tujuan dari terbentuknya partai tidaklah untuk mengubah Spanyol yang Monarki menjadi Republik. Tetapi perubahan tersebut ditujukan untuk memaanuver partai – partai royalis yang tidak mampu dinetralkan oleh Raja Amadeus. Bahkan Jumlah Anggota Parlemen yang berasal dari Partai Republik (Federal) yang terbentuk pada tahun 1968 mengalami penurunan setelah hal tersebut, padahal sebelumnya Partai Republik memenangkan perwakilan sebagai anggota untuk mengisi kursi parlemen yang cukup besar. *First Republic* di Spanyol tidak bertahan lama, status Spanyol sebagai Republik tersebut hanya bertahan selama 11 bulan. Pemerintahan pada masa *First Republic* runtuh, saat itu juga kembalinya Kerajaan Borbón dan naiknya anak dari Ratu Sebelumnya yaitu Ratu Isabel yang bernama Alfonso XII sebagai Raja Spanyol, Raja Alfonso XII tersebut naik ke takhta di umur yang masih terbilang muda, yaitu di umur 17 tahun. Meski begitu, ia mampu memenangkan hati rakyatnya karena bijaksana dan simpati untuk mengunjungi daerah yang terserang kolera dan hancur akibat gempa bumi. Hal – hal tersebut juga menjadi tanda sebagai akhir dari *First Republic* di Spanyol.

Meski telah menjadi Republik, masa *First Republic* juga tetap saja mengalami gejala – gejala sosial, dapat dikatakan periode ini bisa ditandai dengan adanya Politik yang mendalam, serta Ketidakstabilan Sosial dan kekerasan. Masa yang pendek pada periode tersebut juga dipimpin oleh 4 Presiden yang berbeda yaitu, Estanislao Figueras, Pi i Margall, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar. (Blog, 2011).

#### **B. *Second Republic* (1931 – 1936)**

Pasca berakhirnya *First Republic* dan dengan kembalinya sistem kerajaan, Spanyol mengalami kestabilan sejak kembalinya monarki atau dari tahun 1875 hingga tahun 1898. Kestabilan tersebut goyah akibat adanya pergerakan oposisi di tahun 1898 – 1923. Munculnya gejala – gejala sosial dan politik di Spanyol pada saat itu mampu dihadapi sejak adanya Jenderal Primo de Rivera yang melakukan kudeta militer pada 1923 dan saat ia menyampaikan pidatonya mendapat banyak dukungan dari kaum konservatif yang memiliki ketakutan akan tatanan sosial. Tidak hanya itu, ia juga memiliki aliansi dengan Raja Alfonso XIII yang sudah muak dengan politisi yang tidak mampu memberikannya pemerintahan yang efektif karena masih banyak terdapat

fenomena – fenomena sosial yang disebabkan oleh para oposisi. Jenderal Primo de Rivera mendapat dukungan dari raja untuk menjadi diktator, ia memerintah melalui tentara dan memiliki tujuan untuk menyelamatkan Spanyol dari Politisi lama. Di awal masa kediktatorannya ia menerapkan sistem nasionalisme ekonomi, namun pada tahun 1929 terjadi penurunan di mata uang Spanyol dan resesi ekonomi. Ia kehilangan dukungan dari Raja dan tentaranya. Para tentara berbalik melawannya karena ia menghapuskan hak – hak istimewa, dan tidak itu saja hilangnya dukungan dari raja juga dikarenakan raja menganggap munculnya ketidakpuasan yang berkembang di Catalonia, demonstrasi dan konspirasi politisi lama yang dianggap mengancam dinastinya menjadi penyebab hilangnya dukungan Raja Alfonso XIII kepada Jenderal Primo de Rivera. Dan pada tahun 1930, Raja memaksa Jenderal Primo de Rivera untuk turun dari jabatannya tetapi langkah yang diambil Raja tersebut sudah terlalu lambat sehingga menodai kepercayaan dimata para masyarakat dan politisi. Hal tersebut membuat para Politisi Catalonia, Kaum Republik dan aliansi monarki liberal sebelumnya setuju untuk menghapus monarki. Dan terpaksa membuat Republik yang baru yang dikenal dengan *Second Republic*. Hasil pemilu yang diadakan juga membuktikan bahwa mayoritas kota – kota besar adalah Republik. Raja Alfonso XIII meninggalkan Spanyol karena banyaknya demonstrasi yang terjadi di Spanyol.

*Second Republic* merupakan momen kunci dari sejarah modern Spanyol yang dideklarasikan pada tanggal 14 April tahun 1931. Pada masa tersebut, terdapat 4 fase didalamnya. Fase pertama merupakan Pemerintahan Sementara yang dijalankan sampai *Cortes Constituyentes* (Parlemen yang tugas utamanya adalah untuk menghasilkan konstitusi baru) berhasil memberikan bentuk pada pemerintahan baru tersebut. Pemerintahan Sementara pada *Second Republic* merupakan hasil dari koalisi beberapa golongan politik yaitu dibentuk oleh kaum Republik, Nasionalis dan Kaum Sosialis. Masa Pemerintahan Sementara dipimpin oleh Niceto Alcalá Zamora yang dulunya merupakan pendukung kerajaan namun berubah menjadi Kaum Republik.

Pemerintahan Sementara yang baru muncul harus menghadapi banyak sekali gejolak sosial. Kampanye – kampanye dari golongan anarki terus di sebarluaskan, sementara bagian paling konservatif di gereja sangat berlawanan dengan pemerintahan yang baru. Tidak hanya itu, sentimen lama tentang antiklerikalisme kembali lagi dan permasalahan – permasalahan tersebut semakin memburuk saat tahun 1931 tepatnya di bulan Mei, banyak Gereja dan Bihara yang dibakar dan dihancurkan. Satu bulan setelahnya, di bulan Juni tahun 1931 koalisi dari Kaum Republik Kiri dan Sosialis berhasil memenangkan Pemilihan *Cortes Constituyentes*. (Aybar, hal. 2) Namun pada tahun 1933 terjadi krisis sehingga pemerintah dipaksa oleh Kaum Konservatif untuk melakukan Pemilihan, dan terjadi pergantian pemerintahan di *Second Republic*.

Fase selanjutnya merupakan Era Konservatif yang hanya berlangsung dari 1933 hingga 1936. Pemerintahan ini dibentuk oleh Partai Republik Radikal yang dipimpin oleh Lerroux, yang membutuhkan bantuan parlemen dari partai yang mendominasi sayap kanan yaitu CEDA (*Confederación Española de Derechas Autónomas*) atau Konfederasi Spanyol untuk Hukum Otonomi. Pemerintahan yang baru ini melakukan beberapa perubahan terhadap kebijakan yang sudah disahkan dua tahun yang lalu, seperti menghentikan pembangunan di sektor pertanian, melakukan konsesi politik

dengan pihak gereja serta yang sangat menimbulkan permasalahan adalah pemerintah menentang nasionalisme di Catalonia dan Basque. Pemerintahan Era Konservatif ini menolak keinginan Basque pada tahun 1934 terkait izin mengatur daerahnya sendiri dan bertentangan dengan *Generalitat* atau Pemerintahan Daerah di Catalonia.

Dibawah pimpinan Partai Republik dan atas kekealahannya, Kaum Sosialis mengalami Radikalisasi yang pada saat itu juga fasisme sedang berkembang dengan kuatnya kekuasaan Hitler di Jerman pada tahun 1933. Terlebih saat pemerintahan baru dibawah Partai Republik juga menginginkan CEDA untuk masuk kedalam Parlemen, Kaum Sosialis menilai CEDA adalah Partai Fasis dan sepanjang tahun 1934 mereka mengancam akan melakukan pemberontakan apabila CEDA benar – benar diangkat untuk bergabung menjadi anggota Parlemen Spanyol. Mengetahui bahwa CEDA akhirnya resmi bergabung menjadi anggota Parlemen, Kaum Sosialis melakukan hal yang telah mereka ancam sebelumnya yaitu pemberontakan yang dikenal dengan Revolusi 1934. Revolusi tersebut merupakan titik pemisah di Pemerintahan yang ada pada masa *Second Republic*.

Pemberontakan atau Revolusi 1934 terjadi di sebagian besar wilayah Spanyol, namun pemberontakan tersebut banyak mengalami kegagalan. Contohnya, di Barcelona yang merupakan ibukota Catalonia, pemberontakan yang dilakukan dengan jelas menyampaikan unsur pemisahan diri. Pemberontakan – pemberontakan tersebut berhasil dibendung oleh militer. Kecuali pemberontakan yang terjadi di Asturias, dengan penghancuran harta benda terbanyak yang menghasilkan revolusi sungguhan. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan penekanan yang lebih brutal untuk membendung revolusi tersebut. Dampak yang ditimbulkan akibat Revolusi 1934 cukup banyak, ribuan orang meninggal dan terluka, puluhan ribu orang ditangkap akibat melakukan Revolusi tersebut. Setelah berbagai ketegangan dan fenomena yang terjadi disusul dengan berbagai skandal korupsi, Pemerintahan Lerroux memutuskan untuk mengadakan pemilihan pada Februari 1936. Hasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh Front Masyarakat (*Frente Popular*).

Sementara itu, keadaan sosial di Spanyol semakin menegang dengan adanya revolusi dari pihak yang menginginkan berakhirnya demokrasi. Kaum moderat dan demokrat berusaha untuk mempertahankan Pemerintahan konstitusional dan demokrasi namun pertahanan dan perlawanan mereka seakan tidak membawa perubahan sama sekali karena pemberontakan tersebut membawa Spanyol kepada Perang Sipil. Sejak bulan April 1936 banyak terjadi kekerasan dan mengakhiri demokrasi pada era tersebut.

### **C. Perang Sipil (1936 – 1939) dan Rezim Franco (1939 – 1975)**

Perang Sipil terjadi sejak 1936 hingga 1939, dibawah tekanan yang ada saat itu Spanyol terbagi menjadi 2 bagian yaitu Zona Republik (*Zona Republicana*) meliputi daerah pusat, Catalonia dan Daerah Industri Basque. Daerah Catalonia dan Basque berada dibawah kontrol pemerintah dan bersedia untuk mengabdikan diri kepada pemerintah karena Kaum Republik menjamin hak otonomi bagi daerah mereka. Sementara Zona kedua adalah Zona Nasionalis (*Zona Nacional*) yaitu tempat militer menetapkan kediktatoran yang keras, Zona Nasionalis ini adalah daerah – daerah

produksi makanan yang dikuasai oleh Kaum Nasionalis sehingga menyebabkan kekurangan makanan pada Zona Republik.

Selesainya Perang Sipil dimenangkan oleh Kaum Nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco, pada masa itu terjadi desakan dari sesama Jenderal yang memaksa Franco untuk naik dan mengambil alih pemerintahan dengan kata lain, berkuasanya Franco setelah Perang Sipil merupakan hasil dari Perang yang secara darurat membuat Spanyol membutuhkan Pemimpin baru. Diawal masa pemerintahannya, Franco harus memperbaiki hal – hal yang terjadi akibat Perang Sipil seperti pembersihan politik, pengadilan militer, serta kesulitan ekonomi karena pada Perang Sipil banyak kehilangan tenaga kerja ahli, kekeringan dimana – mana, kekurangan devisa dan pembatasan jumlah barang – barang impor yang diterapkan sejak Perang Dunia II serta berbagai kesulitan lainnya.

Sistem pemerintahan yang diterapkan Jenderal Francisco Franco saat itu adalah sistem pemerintahan terpusat sehingga kontrol tertinggi berada di tangan pemerintah. Sentralisasi pemerintahan tersebut membuat daerah – daerah yang sebelumnya diberikan hak otonomi tidak lagi mampu mengatur daerahnya sendiri karena desentralisasi pemerintahan dihapuskan oleh Francisco Franco. Segala jenis peraturan, buku pendidikan, serta seluruh aspek termasuk dalam hal ekonomi, budaya maupun agama diwajibkan menggunakan bahasa Spanyol karena beberapa daerah di Spanyol seperti Catalonia memiliki bahasa daerahnya sendiri dan Francisco Franco melarang keras hal tersebut. Ia memberikan penekanan dalam hal nasionalisme spanyol, demi kesatuan Spanyol. Namun, kebijakan dan peraturan Jenderal Franco saat itu untuk menghapuskan desentralisasi dengan mencabut status Otonomi Khusus yang sebelumnya telah diberikan membuat daerah – daerah seperti Basque dan Catalonia menuntut pemerintah untuk memberikan hak Otonomi Khususnya kembali.

Jenderal Francisco Franco yang diktator memang mampu menekan aktivitas oposisi dan gerakan separatis yang menentang kebijakannya, namun tidak mampu menghentikan dan menghilangkan secara permanen sumber konflik yang berlangsung di Spanyol karena diakhir masa pemerintahannya, jumlah aktivitas gerakan separatisme bertambah banyak. Jenderal Francisco Franco meninggal pada 20 November tahun 1975 yang dengan itu mengakhiri masa pemerintahannya dalam keadaan krisis kronis.

#### **D. Transisi ke Demokrasi (Setelah tahun 1975)**

Transisi pemerintahan setelah meninggalnya Francisco Franco pada 20 November 1975 dengan terpilihnya Raja Juan Carlos seakan membawa angin perubahan bagi Spanyol. Juan Carlos membuka rezim baru yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Belum pernah sebelumnya, ada transisi pemerintahan yang demokrasi tanpa adanya perang sipil, penggulingan revolusioner atau perlawanan lainnya. Transisi pemerintahan ini semakin mengagumkan karena, pelebagaan yang sudah direncanakan untuk menjaga rezim Franco ternyata memungkinkan untuk membuat undang – undang bagi pemerintahan monarki konstitusional yang demokratis.

Di awal masa pemerintahannya, tidak ada yang mengetahui bahwa Juan Carlos akan menjadikan Spanyol sebuah negara demokrasi. Karena Juan Carlos tetap

menjadikan Arias Navarro sebagai perdana menteri nya yang sebelumnya merupakan perdana menteri Francisco Franco yang setia dan menganut paham yang sama dengan diktatornya. Pada Juli 1976, pemerintah memberikan amnesti sebagian yang membebaskan 400 orang tahanan politik. Selanjutnya pada bulan September 1976, Suarez meminta *Cortes* untuk menyetujui program reformasi politik yang meminta adanya lembaga legislatif bikameral yang dipilih secara demokratis. Dengan kemampuan manuver nya yang baik, *Cortes* menyetujui undang – undang tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Referendum Franco, Suarez dan Juan Carlos melakukan referendum terkait reformasi politiknya kepada rakyat Spanyol dan hasilnya lebih dari 90% memberikan persetujuan untuk dilakukannya reformasi. Partai politik kembali dilegalkan, dan satu tahun setengah setelah kematian Francisco Franco, pemilihan demokratis diadakan dan hasilnya Partai UCD (*Union of the Democratic Centre*) yang merupakan Partai dibawah pimpinan Suarez memenangkan kursi terbanyak di Parlemen.

Tugas utama pemerintahan baru dimasa transisi ini adalah menyusun konstitusi baru, karena sebelumnya konstitusi yang ditetapkan merupakan konstitusi yang tidak berdasarkan keinginan rakyat. Untuk itu, Komite Konstitusional di *Cortes* membentuk sebuah komisi parlemen yang mewakili seluruh partai – partai utama dan daerah – daerah penting. Konstitusi 1978 yang mereka bentuk merupakan sebuah konstitusi yang panjang dan rinci karena konstitusi ini bertujuan agar dapat diterima dan mewakili keinginan seluruh pihak. Konstitusi 1978 diratifikasi berdasarkan referendum publik pada Desember 1978 dan menetapkan Spanyol sebagai sebuah negara Monarki Konstitusional. Negara dan gereja dinyatakan terpisah, serta adanya ketentuan mengenai pemberian otonomi khusus di 17 komunitas otonom khusus Spanyol, termasuk Basque dan Catalonia yang sebelumnya sudah mendapatkan Otonomi tetapi sempat dicabut hak otonomi nya dan diberikan lagi berdasarkan Konstitusi 1978.

## **2. Daerah Otonomi Spanyol**

Konstitusi 1978 Spanyol menjadikan Spanyol sebuah negara dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi yaitu dengan memberikan hak kepada daerah – daerah untuk mengatur daerah nya sendiri secara hukum dan administratif. Pemberian hak otonomi kepada daerah – daerah di Spanyol dijelaskan dalam konstitusi 1978 bagian 2 yang mengakui tentang kebangsaan dari daerah – daerah tersebut sebagai keunikan yang menjadi bagian spanyol, disertai dengan penekanan bahwa Spanyol merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah yang diberikan hak otonomi bertanggung jawab dalam perkembangan dan kemajuan daerahnya dengan kemampuan untuk mengatur pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pemerintahan perkotaan dan pedesaan nya sendiri. Hak otonomi yang memberikan fungsi bagi daerah untuk mengatur daerah nya sendiri membuat daerah tersebut terlihat sebagai negara federal di Spanyol karena mereka memiliki lembaga pemerintahan nya sendiri dengan bentuk yang menyerupai lembaga pemerintahan negara. Daerah yang diberikan hak otonomi diizinkan untuk membentuk lembaga eksekutif, legislatif serta administrasi

finansialnya. Spanyol dianggap sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang sangat desentralisasi dengan baik karena memiliki 17 Komunitas Otonom di negara nya.

Pemerintah Spanyol memberikan hak otonomi kepada daerah yang memiliki sejarah khusus atas daerahnya, pemberian hak otonomi terhadap daerah – daerah di Spanyol memakan waktu yang berbeda – beda tergantung dengan seberapa pantas daerah tersebut untuk menapatkan hak otonomi. Ada daerah yang mendapatkan hak otonomi tanpa memakan waktu yang lama, dan sebagian besar membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Hal tersebut bergantung kepada keunikan yang dimiliki daerah tersebut. Daerah seperti Catalonia, Basque, mendapatkan hak otonomi mereka lebih awal bahkan sebelum disahkan dalam Konstitusi 1978, karena secara historis daerah tersebut memiliki bahasa sendiri, budaya sendiri yang berbeda dengan Spanyol dan bahkan memiliki bendera sendiri. Komunitas Otonomi Spanyol terdiri dari 17 daerah di Spanyol serta 2 kota otonomi di Afrika yang meliputi; Catalonia, Basque, Galicia, Andalusia, Aragon, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla Leon, Valencia, Balearies, Canaries, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Mureia, Navarre, dan 2 kota otonomi di Afrika yaitu Ceuta an Melilla. Pemerintah Spanyol berhak memberikan hak otonomi tidak hanya kepada daerah – daerah di Spanyol yang memiliki keunikan pada identitas daerahnya, namun juga bisa memberikan hak otonomi atas dasar kepentingan negara, sama seperti yang diberikan ke 2 kota yang ada di Afrika. (IMSOL: Instituto Mediterráneo Sol, 2010)

## **DINAMIKA PERGERAKAN KEMERDEKAAN CATALONIA**

Gerakan separatisme atau gerakan – gerakan untuk memisahkan diri Catalonia dari Spanyol sebenarnya sudah berlangsung sejak lama yaitu sudah sejak 3 abad yang lalu. Karena, Catalonia sendiri awalnya merupakan bekas kerajaan yang kemudian menjadi wilayah integral Spanyol. Hal itu juga yang membuat kebanyakan penduduk Catalonia merasa bahwa mereka bukan bagian dari Spanyol dan perilaku mereka terlihat dalam pengutamaan bahasa Catalonia dan budaya Catalonia. Untuk menjaga keberadaan sejarah dan budaya Catalonia, usaha yang dilakukan sudah cukup banyak. Pemerintah yang menganggap bahwa nasionalisme Catalonia berlebihan telah beberapa kali bertindak, penekanan untuk mengurangi nasionalisme Catalonia dilakukan dengan melarang penggunaan bahasa Catalonia sebagai bahasa utama, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan nasionalisme Catalonia. Kebijakan yang diberikan pemerintah kepada Catalonia untuk mengurangi nasionalisme berlebihan yang menimbulkan gerakan separatisme tidak dapat mengatasi permasalahan secara permanen melainkan hanya sementara, karena tidak lama setelahnya tetap bermunculan grup – grup separatisme yang bertujuan untuk memerdekakan Catalonia. Pergerakan Catalonia dengan klimaks nya pada tahun 2017 bulan Oktober yang mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak sebenarnya telah diawali beberapa pemberontakan sebelumnya, bermula saat Catalonia belum menjadi wilayah otonomi di Spanyol. Dinamika Pergerakan Kemerdekaan Catalonia dijelaskan dalam rangkaian peristiwa dibawah ini:



## **1. Defisit Pajak**

Catalonia telah menjadi faktor bagi pertumbuhan ekonomi Spanyol, sebagian besar pendapatan Spanyol berasal dari Catalonia. Penduduk Catalonia membayar pajak yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Pusat Spanyol, namun yang mereka terima tidak sebanding dengan yang dibayarkan kepada Pemerintah Pusat. Bahkan, jumlah yang diterima juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Catalonia. Persoalan mengenai pajak ini bermula sejak tahun 1988 yang pada saat itu Catalonia mengalami defisit sebesar 110.000 Peseta (Mata uang Spanyol di tahun 1869 hingga tahun 2002) sedangkan Pemerintah Pusat Spanyol mengalami Surplus sebanyak 47.000 Peseta. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, namun terus berkelanjutan. Pemerintah Spanyol menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh Catalonia bukan untuk pembangunan infrastruktur penting maupun pembangunan lain di Catalonia. Pembangunan yang dilakukan tidak bersifat merata sementara Catalonia juga membayar pajak dengan jumlah yang banyak. Uang pajak Catalonia digunakan untuk membangun daerah – daerah pedesaan di Spanyol serta daerah – daerah yang lebih miskin. Wilayah lain di Spanyol selain mendapat bantuan pembangunan juga mendapatkan layanan publik yang baik serta pemotongan pajak atau dengan kata lain jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebanyak yang dibayarkan Catalonia. Sementara Catalonia harus menanggung beban yang lebih berat untuk membangun daerahnya sendiri dan secara tidak langsung juga harus membantu pembangunan wilayah lain. Hal tersebut membuat Catalonia mengalami krisis ekonomi akibat dari defisit pajak yang diterimanya. Defisit pajak di Catalonia sejak saat itu terus menimbulkan gesekan antara Catalonia dan Pemerintah Spanyol. Ditambah tingginya angka pengangguran, banyaknya korupsi yang terjadi, naiknya tingkat kemiskinan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi Catalonia membuat Catalonia menyimpulkan bahwa perubahan politik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah Catalonia berinisiasi untuk melakukan perubahan pada hak otonomi nya di dalam Konstitusi 1978 agar mendapat perluasan termasuk dalam hal menarik pajak dan menetapkan jumlah tertentu yang harus diberikan kepada Pemerintah Pusat. (Harris, 2014)

## **2. Merubah Status Otonomi pada Konstitusi 1978**

Krisis ekonomi yang sebelumnya dihaapi oleh Catalonia membuat Rakyat Catalonia menyadari untuk melakukan perubahan dengan melibatkan diri kedalam politik. Pemilihan umum di Catalonia pada tahun 2003 diwarnai oleh berbagai Partai Politik yang menjanjikan perubahan terhadap status otonomi Catalonia. Setelah pemilihan umum, Partai – Partai Politik yang terpilih menyusun perubahan terhadap Konstitusi 1978 sesuai dengan janji yang ditawarkan saat Kampanye. Perubahan yang dilakukan adalah menambahkan kata – kata kedalam Konstitusi 1978 bahwa Catalonia merupakan sebuah bangsa

yang bertujuan untuk menyampaikan secara tidak langsung bahwa Catalonia merupakan negara bagian di dalam Spanyol. Penambahan kata tersebut dikarenakan Catalonia merasa Spanyol tidak mampu menerapkan konstitusi 1978 dengan baik karena kekhususan Catalonia dan kebangsaannya tidak sepenuhnya diakui dalam tingkatan rakyat Spanyol. Serta menambahkan bahwa Bahasa Catalonia setara dengan Bahasa Spanyol yaitu menjadi bahasa yang wajib dan bukan hanya bahasa resmi semata. *Tribunal Superior de Justicia de Catalunya* dijadikan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Catalonia. (Harris, 2014)

Tidak hanya itu, perubahan Konstitusi 1978 juga terdapat dalam masalah pajak, berdasarkan defisit pajak dan krisis ekonomi yang dihadapi sebelumnya, Catalonia memperluas otonominya agar memiliki kapasitas untuk mengumpulkan pajaknya sendiri. Serta pendefinisian ulang mengenai jaminan akan jumlah reinvestasi negara ke Catalonia harus proporsional atau seimbang dengan populasi yang ada di Catalonia. Karena sebelumnya yang diterima Catalonia lebih sedikit dari jumlah yang dibyarkan dan juga tidak seimbang dengan jumlah populasi di Catalonia. Pada masa ini, fokus Catalonia adalah perluasan hak otonominya bukan kepada kemerdekaannya. Karena ketidakadilan yang dirasakan oleh Catalonia dan Status Otonomi Catalonia yang tidak memenuhi aspirasi rakyatnya akhirnya mencapai suatu keputusan untuk menyusun kembali Konstitusi 1978.

Proposal mengenai perubahan Konstitusi 1978 berhasil disetujui oleh Parlemen Catalonia pada tahun 2005 dengan mendapat persetujuan dari sejumlah 120 anggota parlemen dengan jumlah total 135 anggota parlemen, anggota parlemen yang tidak menyetujui adalah yang berasal dari *People's Party* dibawah pimpinan perdana menteri Spanyol, Mariano Rajoy. Proposal tersebut setelah berhasil melalui Parlemen Catalonia kemudian dikirim ke Pemerintah Spanyol untuk mengetahui apakah Konstitusi tersebut dapat diterima atau tidak. Dengan diterimanya rancangan perubahan Konstitusi 1978 tersebut memberi kesempatan bagi Catalonia untuk diakui sebagai bangsa dan Spanyol terdiri dari bangsa – bangsa dan daerah – daerah. Serta mencegah intervensi Pemerintah Pusat Spanyol terhadap hak otonomi yang telah diberikan, dan kesempatan bagi Catalonia untuk mendapatkan transparansi finansial terkait defisit pajak sebelumnya. Rancangan status otonomi yang baru tersebut akan membuat Spanyol mengakui perbedaan dan keanekaragaman yang ada di negaranya sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai bangsa serta menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi. (Catalonia P. D.)

### **3. Status Otonomi 2006**

Setelah melalui berbagai rintangan, Rancangan Perubahan Status Otonomi Catalonia pada Konstitusi 1978 berhasil disetujui oleh Parlemen Spanyol meskipun Rancangan tersebut tidak secara utuh diterapkan karena Parlemen Spanyol masih akan meninjau kembali dan mengubah beberapa hal jika

diperlukan dalam rancangan yang diajukan oleh Catalonia. Parlemen Catalonia mengurangi beberapa ketentuan mengenai pemerintahan sendiri yang diajukan Catalonia dalam rancangannya, serta tidak mengakui Catalonia sebagai bangsa, melainkan sebagai kenyataan kebangsaan yang disebut bangsa oleh Parlemen Catalonia serta ditempatkan di pembukaan saja. Meski rancangan yang diterima oleh Pemerintah Spanyol diubah kembali oleh Spanyol, setelah diadakan referendum, sebanyak 73,9 % Rakyat Catalonia setuju untuk meratifikasi Status Otonomi yang baru yang kemudian ditandatangani oleh Raja Juan Carlos I untuk disahkan dan masuk kedalam undang – undang dasar Spanyol. Status otonomi tersebut mulai berlaku di Catalonia pada Agustus 2006.

Pada tahun 2010, setelah status otonomi baru Catalonia diterapkan selama 4 tahun, Mahkamah Konstitusi Spanyol menghapuskan 14 artikel dalam Status Otonomi yang baru dan menerapkan kembali 7 artikel lainnya. Hal tersebut menghilangkan tujuan utama perubahan Status Otonomi Catalonia yang direncanakan sejak 2003. Mahkamah Konstitusi Spanyol memperlakukan bagian yang menjelaskan Catalonia sebagai sebuah bangsa karena tidak memiliki dasar hukum dan menekankan kembali pernyataan yang dicetuskan oleh Francisco Franco pada waktu itu bahwa Spanyol adalah negara kesatuan utuh yang tidak dapat diganggu gugat dan hanya memiliki satu kebangsaan yaitu Bangsa Spanyol. Perubahan yang ditolak Mahkamah Konstitusi Spanyol juga kebanyakan berada pada masalah penggunaan Bahasa Catalonia, masalah pajak dan perubahan yang dianggap penting oleh Catalonia. (Minder, *The Struggle for Catalonia: Rebel Politics in Spain*, 2017)

#### **4. Deklarasi Kedaulatan 2013**

Pada tahun 2013 Parlemen Catalonia mengeluarkan sebuah deklarasi yang sebelumnya mendapat suara mayoritas sehingga akhirnya disetujui. Deklarasi ini adalah bentuk dari keinginan Rakyat Catalonia untuk diakui sebagai sebuah kedaulatan. Namun Pemerintah Spanyol menyanggah deklarasi tersebut dan kembali menekankan bahwa Spanyol adalah suatu kesatuan berdaulat yang tidak terpisahkan dan tidak ada pecahan dari kedaulatan Spanyol yang diakui sebagai sebuah kedaulatan. Menyikapi tanggapan Pemerintah Spanyol, Artur Mas yang saat itu merupakan Presiden Catalonia menyatakan bahwa suatu kehendak politik tidak dapat ditangguhkan, dan Catalonia memiliki hak untuk diakui sebagai sebuah kedaulatan. Artur Mas saat itu menyatakan bahwa ia akan tetap melanjutkan proses kemerdekaan Catalonia melalui sebuah referendum. (Harris, 2014)

Presiden Catalonia memutuskan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Spanyol agar diberikan kuasa untuk mengadakan referendum berdasarkan permintaan dari mayoritas anggota Parlemen Catalonia, namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh Spanyol, karena sebagian besar dari Parlemen Spanyol menolak memberikan kuasa bagi Catalonia untuk mengadakan referendum. Penolakan Spanyol akhirnya menimbulkan 1,6 juta orang turun ke

jalan dan berpegangan tangan sebagai bentuk ungkapan bahwa Catalonia berhak menentukan masa depan mereka sendiri. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2013 yang diatur oleh *The Catalan National Assembly*, tidak ada laporan mengenai keributan pada saat aksi tersebut berlangsung, bahkan keadaannya berlangsung damai dan penuh sukacita. (Catalonia P. D.)

Diakhir tahun 2013, tepatnya pada tanggal 12 Desember Catalonia telah mengumumkan tanggal untuk dilakukannya referendum pada tanggal 9 November 2014. Pelaksanaan referendum dilaksanakan pada tanggal tersebut dikarenakan agar Catalonia dapat melakukan perundingan terlebih dulu dengan Spanyol sehingga referendum yang dilakukan tidak *illegal*.

Pemerintah Catalonia membuat surat permohonan resmi kepada Spanyol pada Januari 2014 yang berisi permintaan untuk diberikan kuasa agar dapat mengadakan referendum. Namun 86% anggota Parlemen Spanyol memilih tidak memberikan kuasa kepada Catalonia untuk mengadakan referendum. Di Hari Nasional Catalonia, rakyat di Catalonia kembali turun ke jalan dan membentuk huruf “V” yang berarti “Vote” atau memilih, mereka meminta diadakan referendum untuk memilih dan menentukan apakah Catalonia akan merdeka atau tidak. (Catalonia P. D.)

Presiden Artur Mas mengumumkan rencana lainnya yaitu dengan melakukan Proses Partisipasi Masyarakat yang mengizinkan seluruh masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan. Namun Pemerintah Spanyol kembali melakukan penangguhan terhadap rencana baru tersebut 5 hari sebelum pelaksanaan yang juga berusaha menutup segala usaha untuk mengetahui aspirasi Rakyat Catalonia mengenai hubungannya dengan Spanyol. Pada 21 November 2014 perwakilan politik Catalonia yaitu, Presiden Artur Mas, wakil presidennya, dan menteri pendidikan dikenakan sanksi kriminal oleh Kejaksaan Negara Spanyol atas ketidakpatuhan, penyalahgunaan kekuasaan, serta merusak jalannya keadilan. Presiden Artur Mas mempertahankan hak Catalonia bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan pemilihan atas kemerdekaan dan siap untuk melakukan pemilihan umum lebih awal yang akan menghasilkan pemungutan suara *de facto* atas kemerdekaan apabila Spanyol menolak segala cara Catalonia untuk melakukan referendum. Peristiwa tersebut akhirnya membuat Perdana Menteri Mariano Rajoy datang ke Catalonia. Pada Januari 2015, Pemerintah Spanyol telah menetapkan penolakan terhadap segala bentuk usaha Catalonia untuk mengadakan referendum dan membuat Catalonia bisa melakukan pemungutan suara *de facto* karena akan diadakan pemilu pada 27 September 2015. Penyerahan kekuasaan kepada Carles Puigdemont sebagai Presiden Catalonia yang baru oleh Artur Mas dilakukan pada Januari 2016, Pemerintahan Catalonia yang baru berada dibawah pimpinan Partai Pro-Kemerdekaan yang berkomitmen untuk memerdekakan Catalonia. (Catalonia P. D.)

Pada Hari Nasional Catalonia, yaitu 11 September 2016 terjadi demonstrasi kembali selama 5 tahun berturut – turut yang meminta kemerdekaan Catalonia dan tanpa ada tanggapan dari Pemerintah Spanyol yang terus mengabaikan

permintaan Catalonia. Pemerintah Spanyol menuntut tidak hanya kepada 3 representatif politik Catalonia yaitu mantan Presiden Catalonia Artur Mas beserta wakilnya dan Menteri Pendidikan atas peristiwa yang terjadi pada 9 November 2015 tetapi juga lebih dari 400 pejabat terpilih dituntut atas alasan politik, dan itu membuat 80.000 orang Catalonia melakukan pembelaan terhadap pihak – pihak yang dituntut. Pada Maret 2017 mantan Presiden Artur Mas dilarang selama 2 tahun dari kantor publik atas tindakannya yang telah lalu. Sesuai dengan komitmennya, Presiden Catalonia yang baru yaitu Carles Puigdemont mengumumkan pada Juni 2017 bahwa referendum untuk penentuan nasib Catalonia sendiri akan diadakan pada Oktober 2017. Penandatanganan dekrit mengenai referendum yang akan dilaksanakan ditandatangani oleh para menteri pada September 2017. Di Hari Nasional Catalonia pada 11 September 2017, 1 juta orang mendukung adanya referendum dengan memenuhi jalan di Barcelona. 9 hari setelah Hari Nasional Catalonia, Pemerintah Spanyol memerintahkan untuk menyita segala atribut untuk pemilihan pada referendum termasuk kotak suara dan menyatakan bahwa referendum yang akan diadakan pada Oktober 2017 adalah *illegal*. Tetapi referendum tetap dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 dengan hasil 90% mendukung untuk kemerdekaan Catalonia. Hal itu ditanggapi Spanyol dengan mengerahkan Polisi untuk menyita kotak suara dan meninggalkan 894 orang terluka. Penandatanganan deklarasi kemerdekaan Catalonia dilakukan pada 10 Oktober 2017 di Parlemen Catalonia oleh Partai – Partai Pro-Kemerdekaan.

## **PENOLAKAN SPANYOL TERHADAP DEKLARASI KEMERDEKAAN CATALONIA**

Catalonia telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Pemerintah Spanyol untuk diberikan kuasa melakukan referendum, namun Pemerintah Spanyol tidak memberikannya dan Catalonia akhirnya tetap melakukan referendum pada 1 Oktober yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan oleh Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. Deklarasi kemerdekaan Catalonia yang sebelumnya telah ditandatangani pada 10 Oktober 2017 tidak langsung diterapkan karena Presiden Catalonia paham bahwa untuk menjaga kemerdekaannya ia membutuhkan banyak dukungan terutama dari luar negeri sehingga Carles Puigdemont memberikan waktu untuk diadakannya mediasi ataupun negosiasi sebagai solusi atas hal tersebut. Deklarasi tersebut juga ditandatangani tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah Spanyol, usai penandatanganan Deklarasi tersebut Pemerintah Spanyol menunggu klarifikasi dari Catalonia terkait tindakan yang telah dilakukannya, namun tidak ada dialog ataupun klarifikasi dari Catalonia. Secara sepihak, Parlemen Catalonia mengesahkan Deklarasi Kemerdekaan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan perolehan suara 70 anggota parlemen setuju sementara 10 anggota menolak dari jumlah 135 orang anggota, hal tersebut dikarenakan banyak anggota parlemen yang keluar meninggalkan

ruang parlemen sebagai bentuk protes akan pemungutan suara terhadap kemerdekaan Catalonia. (DW News, 2017)

Pemerintahan Spanyol sendiri menolak Deklarasi Kemerdekaan Catalonia dengan didasari dua alasan yaitu dikarenakan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia bersifat “*illegal*” menurut Konstitusi Spanyol dan alasan lain adalah karena Spanyol terdiri dari beberapa daerah yang juga menjadi daerah otonomi dengan warisan sejarah serta kebangsaan seperti Catalonia yang menimbulkan nasionalisme akan daerahnya sendiri maka efek domino akan hal serupa oleh daerah lain merupakan alasan Spanyol untuk memberikan penolakan terhadap Deklarasi Kemerdekaan Catalonia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penolakan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia oleh Spanyol:

### **1. *Illegal***

Sebelum penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan pada 10 Oktober 2017, Catalonia terlebih dahulu melakukan Referendum Kemerdekaan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk Catalonia yang menginginkan pemisahan diri dengan Spanyol. Referendum tersebut diadakan oleh Pemerintah Catalonia pada tanggal 1 Oktober 2017. Hasil dari Referendum Kemerdekaan Catalonia menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk yang terlibat pada pemungutan suara menyetujui pemisahan diri dengan Spanyol. Pemerintah Catalonia mengatakan bahwa jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara pada referendum tersebut berjumlah 2,26 juta jiwa yang berarti merupakan 42,3% pemilih yang mengikuti referendum dari jumlah total pemilih sah di Catalonia yang berjumlah 5,34 juta jiwa. Meskipun referendum di Catalonia menghasilkan 90% suara yang menyetujui pemisahan diri, namun jumlah 90% tersebut tidak berasal dari jumlah keseluruhan pemilih sah di Catalonia, melainkan berasal dari jumlah pemilih yang tidak sampai separuh dari jumlah keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan tidak seluruh warga Catalonia ikut berpartisipasi dan hanya berdiam diri. Selain itu, Referendum Kemerdekaan Catalonia hanya dilakukan di Catalonia saja, tidak mencakup keseluruhan Spanyol. Referendum tersebut juga diadakan sepihak karena sebelumnya tidak mendapat persetujuan serta kuasa dari Pemerintah Spanyol untuk mengadakan referendum. Oleh karena itu, Spanyol menganggap referendum kemerdekaan yang diadakan oleh Catalonia tidak memiliki dasar hukum dan juga dilakukan secara unilateral karena hanya melibatkan Catalonia saja dan dengan melibatkan jumlah pemilih yang tidak sampai separuh dari jumlah keseluruhan pemilih sah di Catalonia.

Pemerintah Spanyol juga menganggap bahwa Referendum Kemerdekaan Catalonia telah melanggar Konstitusi Spanyol dan mengancam kestabilan politik di Spanyol. Sebagaimana Pasal 2 dalam Konstitusi Spanyol menyebutkan:

*“The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish Nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards; it recognises and guarantees the right to selfgovernment of the nationalities and regions of*

*which it is composed and the solidarity among them all.”* (Congreso de los Diputados, 1978)

Pasal 2 dalam Konstitusi Spanyol yang berisi tentang kesatuan nasional Spanyol menjelaskan bahwa Bangsa Spanyol adalah kesatuan yang tak terpisahkan dan Spanyol merupakan tempat bagi seluruh rakyatnya yang tak dapat dibagi serta mengakui dan menjamin hak untuk pemerintahan sendiri bagi daerah – daerah yang memiliki warisan sejarah yaitu daerah – daerah dengan status otonomi. Pasal tersebut menjadi dasar penolakan Spanyol atas Deklarasi Kemerdekaan Catalonia karena seperti apa yang telah dilakukan Catalonia, deklarasi kemerdekaannya tidak melibatkan seluruh rakyat Spanyol bahkan tidak melibatkan seluruh rakyat Catalonia padahal sudah jelas dalam Konstitusi Spanyol disebutkan bahwa Spanyol adalah bangsa yang tak terpisahkan. Referendum seharusnya dilakukan dengan izin dari pemerintah pusat dan dilakukan oleh seluruh Rakyat Spanyol, karena Catalonia merupakan bagian dari Spanyol sehingga seluruh Rakyat Spanyol berhak untuk memberikan suara apakah mereka menginginkan Catalonia untuk memisahkan diri atau tidak. Atas hal tersebut, Pemerintah Spanyol memutuskan untuk menanggihkan hak otonomi Catalonia dengan menerapkan sanksi yang berdasarkan Pasal 155 dalam Konstitusi Spanyol. Adapun Pasal 155 berisi tentang:

- 1. If a Self-governing Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-governing Community and failed to receive satisfaction therefore, may, following approval granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to compel the Community to meet said obligations, or to protect the abovementioned general interest.*
- 2. With a view to implementing the measures provided for in the foregoing paragraph, the Government may issue instructions to all the authorities of the Self-governing Communities.* (Congreso de los Diputados, 1978)

Dalam Pasal 155 ayat 1 pada Konstitusi Spanyol disebutkan bahwa jika suatu daerah otonomi tidak memenuhi kewajibannya yang diwajibkan untuknya dalam Konstitusi atau hukum lainnya, atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum Spanyol, maka Pemerintah Spanyol berhak untuk mengambil tindakan yang memaksa daerah otonomi tersebut untuk memenuhi kewajiban serta melindungi kepentingan umum Spanyol dengan memperoleh persetujuan dari mayoritas anggota senat sebelumnya. Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Spanyol dapat dilakukan apabila sebelumnya juga sudah memberi peringatan kepada daerah otonomi namun tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Spanyol. Dan dalam Pasal 155 ayat 2 Konstitusi Spanyol

kembali menekankan bahwa untuk menerapkan langkah – langkah yang diatur dalam ayat 1 maka Pemerintah Spanyol dapat mengeluarkan perintah kepada semua otoritas di daerah otonomi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, sebelum melakukan tindakan yang memaksa Catalonia untuk kembali melakukan kewajibannya sebagai sebuah daerah otonomi Pemerintah Spanyol melalui Perdana Menteri nya yaitu Mariano Rajoy telah memberi peringatan kepada Catalonia untuk menyerahkan dan membatalkan kemerdekaannya namun sampai batas waktu yang ditentukan Catalonia tidak memberikan klarifikasi serta meratifikasi deklarasi kemerdekaan yang sebelumnya telah ditandatangani secara sepihak. Perlakuan Catalonia tersebut membuat Spanyol mengambil tindakan yang dapat memaksa Catalonia untuk kembali memenuhi kewajibannya yaitu dengan mengambil alih sementara Pemerintahan Catalonia dengan menanggukkan status otonomi Catalonia untuk melakukan pemilihan ulang dan mencopot Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. Anggota Parlemen Catalonia yang berjumlah 135 orang juga dicopot dari jabatannya dan akan dilakukan pemilihan ulang untuk Anggota Parlemen Catalonia yang ikut mengesahkan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sebelumnya. Pemerintah Spanyol memerintahkan pemilihan umum di Catalonia untuk diselenggarakan pada 21 Desember 2017. (Sam Jones, 2017)

## **2. *Domino Effect***

Catalonia merupakan salah satu daerah otonomi dengan status otonomi yang besar. Tempat yang merupakan kota kedua terbesar setelah Madrid di Spanyol dengan populasi 7,2 juta jiwa. Catalonia bukan satu – satunya daerah di Spanyol yang terlahir dengan warisan sejarah, bahasa, dan budaya yang membuat penduduknya memiliki rasa nasionalisme terhadap daerah nya sendiri. Basque, merupakan salah satu daerah di Spanyol yang juga memiliki Status Otonomi yang besar dan diakui sebagai daerah otonomi di tahun yang sama seperti Catalonia. Basque memiliki warisan sejarahnya sendiri yang membuat penduduknya juga memiliki rasa nasionalisme terhadap daerah Basque. Rasa nasionalisme tersebut membuat timbulnya suatu organisasi separatisme yang bernama ETA atau *Euskadi Ta Askatasuna*. Organisasi tersebut awalnya merupakan organisasi untuk menentang rezim Francisco Franco. Karena pada masanya, penggunaan bahasa, atribut sejarah maupun simbol yang berpotensi memicu nasionalisme berlebihan dilarang termasuk yang terjadi pada Basque dan Catalonia.

Tindakan sepihak Catalonia mampu memicu dan memotivasi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Terlebih kepada daerah otonomi yang memang memiliki warisan sejarah yang berbeda dari daerah lainnya. Sehingga nasionalisme mereka seketika meningkat dan memungkinkan untuk melakukan hal yang sama. Terutama kepada daerah yang juga memiliki sejarah gerakan separatisme seperti Basque, sangat rawan untuk terjadinya efek domino pada daerah ini. Jika efek domino terjadi di Spanyol maka Spanyol akan terpecah



belah dan menimbulkan krisis yang amat buruk. Tidak hanya di Spanyol, efek domino dari tindakan sepihak Catalonia juga berpotensi untuk memicu perilaku yang sama oleh daerah lain di negara – negara eropa. Hal tersebut juga merupakan kekhawatiran dari pihak Spanyol dan juga Uni Eropa karena akan menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan dalam skala besar

## **Kesimpulan**

Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan secara sepihak oleh daerah Catalonia mendapat penolakan dari Pemerintah Spanyol, karena Spanyol menganggap bahwa referendum kemerdekaan yang diadakan oleh Catalonia tidak memiliki dasar hukum dan juga dilakukan secara unilateral karena hanya melibatkan Catalonia saja dan dengan melibatkan jumlah pemilih yang tidak sampai separuh dari jumlah keseluruhan pemilih sah di Catalonia. Pemerintah Spanyol juga menyatakan bahwa Referendum Kemerdekaan Catalonia telah melanggar Konstitusi Spanyol (Pasal 2) tentang kesatuan Spanyol yang mengancam kestabilan politik di Spanyol. Spanyol juga menerapkan Pasal 155 yang tertera dalam Konstitusi Spanyol tentang aturan untuk mengambil tindakan yang memaksa daerah otonomi tersebut agar memenuhi kembali kewajibannya serta melindungi kepentingan umum Spanyol dengan memperoleh persetujuan dari mayoritas anggota senat sebelumnya. Pemerintah Spanyol mengambil alih sementara Pemerintahan Catalonia dengan menanggihkan status otonomi Catalonia untuk melakukan pemilihan ulang dan mencopot Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. Anggota Parlemen Catalonia yang berjumlah 135 orang juga dicopot dari jabatannya dan akan dilakukan pemilihan ulang untuk Anggota Parlemen Catalonia yang ikut mengesahkan Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sebelumnya. Pemerintah Spanyol memerintahkan pemilihan umum di Catalonia untuk diselenggarakan pada 21 Desember 2017. (Sam Jones, 2017) Alasan lain yang membuat Spanyol menolak referendum dan deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Catalonia adalah efek domino dari tindakan sepihak Catalonia yang mampu memicu dan memotivasi daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Terlebih kepada daerah otonomi yang memang memiliki warisan sejarah yang berbeda dari daerah lainnya. Sehingga nasionalisme mereka seketika meningkat dan memungkinkan untuk melakukan hal yang sama.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Aybar, J. C. (n.d.). Geography and History – Bilingual Studies. *The 2nd Republic and the Civil War (1931-1936)*.

Harris, S. (2014). *Catalonia Is Not Spain - A Historical Perspective*. Lulu Press, Inc.

Minder, R. (2017). *The Struggle for Catalonia: Rebel Politics in Spain*. Oxford University Press.

Pareira, N. (2017, September 29). *euronews*. Retrieved November 2, 2017, from <http://www.euronews.com/2017/09/29/basque-separatists-throw-support-behind-catalan-referendum>

### Dokumen dari Website:

*Congreso de los Diputados*. (1978). Retrieved November 3, 2017, from [http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist\\_Normas/No rm/const\\_espa\\_texto\\_ingles\\_0.pdf](http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/No rm/const_espa_texto_ingles_0.pdf)

Catalonia, P. D. (n.d.). *DIPLOCAT*. Retrieved November 1, 2017, from [http://www.diplocat.cat/files/timelines/Timeline\\_EN.pdf](http://www.diplocat.cat/files/timelines/Timeline_EN.pdf)

### Jurnal:

Richard John Harrison, J. F. (2017, November 2). *Spain*. 7.

Rodriguez, V. (2017, 10 27). *Encyclopædia Britannica*. Retrieved 10 30, 2017, from <https://www.britannica.com/place/Catalonia>

### Media Massa Online:

(n.d.). Retrieved February 27, 2018, from *Catalan News*: <http://www.catalannews.com/politics/item/milestones-in-catalonia-s-self-determination-before-2012-massive-pro-independence-demonstration>

(2011, July 7). Retrieved March 15, 2018, from *The Telegraph*: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8622688/ETA-timeline-list-of-attacks-by-Basque-separatist-group.html>

(2017, October 28). Retrieved March 15, 2018, from DW News: <http://www.dw.com/en/catalonia-crisis-spain-takes-over-regional-parliament-calls-elections-after-independence-declaration/a-41135190>

AFP, I. O. (2017, October 1). *theindependent*. Retrieved October 30, 2017, from <http://www.theindependentbd.com/post/116726>

Maulana, V. (2014, 11 10). *Sindonews.com: Sumber Informasi Terpercaya*. Retrieved 10 30, 2017, from Sumber Informasi Terpercaya: <https://international.sindonews.com/read/922430/41/catalonia-wilayah-kaya-yang-ingin-lepas-dari-spanyol-1415624283>

Sam Jones, S. B.-H. (2017, October 28). Retrieved March 15, 2018, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/27/spanish-pm-mariano-rajoy-asks-senate-powers-dismiss-catalonia-president>

#### **Website:**

Tusk, D. (2017, October 27). Retrieved March 15, 2018, from <https://twitter.com/eucopresident/status/923914819631271936?lang=en>

Blog, T. S. (2011, July 7). Retrieved February 10, 2017, from The Spanish Blog: <https://www.thspanishblog.com/2011/07/history-of-spain-the-first-spanish-republic/>

*IMSOL: Instituto Mediterráneo Sol*. (2010, August 3). Retrieved February 20, 2018, from Instituto Mediterráneo Sol: <https://www.inmsol.com/blog/autonomous-communities-spain/>